Eksis

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 13(1), November 2022, 34-42
Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari Jambi
ISSN 2580-6882 (Online), ISSN 2087-5304 (Print), DOI 10.33087/eksis.v13i2.301

Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
(Study Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi)

Abd. Haris[1], Ratih Rosita[2], Asrini[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jambi, Indonesia
Correspondence email: haris.abd66@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil empiris yaitu Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengedalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus OPD Dinas Provinsi Jambi). Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara di 19 Dinas Provinsi Jambi. Dari 57 kuesioner yang telah dibagikan, diperoleh 51 responden yang dapat dimasukan dalam pengolahan data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunaka Metode *Purposive Sampling*. Teknik Analisis data menggunakan Teknik Analisis Regresi Linear Berganda. *Software* yang digunakan untuk olah data adalah SPSS versi 22. Analisis statistik yang digunakan dalam penellitian ini yaitu Uji Validitas, Uji Reliabilitas dan Uji Asumsi Klasik. Hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: Pertama Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Kedua Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerinthan Daerah. KetigaTtransparansi Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Keempat Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerinthana Daerah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Abstract*. This study aims to obtain empirical results, namely the Effect of Accountability, Transparency and Internal Control Systems on Local Government Performance (Case Study of OPD Dinas Jambi Province). Respondents in this study were service heads, financial administration officials, and treasurers in 19 Jambi provincial offices. Of the 57 questionnaires that were distributed, 51 respondents were obtained which could be included in data processing. The sampling technique in this study used the purposive sampling method. The data analysis technique uses the Multiple Linear Regression Analysis Technique. The software used for data processing is SPSS version 22. The statistical analysis used in this research is the Validity Test, Reliability Test and Classical Assumption Test. The results of testing the hypothesis are as follows: First, Accountability, Transparency and Internal Control Systems Affect Local Government Performance. Both Accountability Affects Regional Government Performance. Third, transparency has no effect on local government performance. The Four Internal Control Systems Influence Regional Government Performance.*

Keywords*: Accountability, Transparency and Internal Control Systems on Local Government Performance.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Dalam organisasi sektor publik, kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Saputra et al., 2014).

Mardiasmo, (2013) menerangkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi menurut Dwiyanto, (2015) transparansi adalah sebagai wadah penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Selanjutnya menurut Andrianto, (2007) transparansi adalah suatu "keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik". Prinsip transparansi menurut Werimon, Ghozali, dan Nasir (2007) meliputi 2 aspek, yaitu "komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak-hak masyarakat terhadap akses informasi.

Di samping itu, pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 merupakan Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas,

efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.

Fenomena berikut adalah terkait dengan belum baiknya kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa kinerja pemerintah Provinsi Jambi menurun pada saat Pemda lainnya mampu meningkatkan kinerja pemdanya. Kemendagri menggolongkan status kinerja pemerintah daerah ke dalam beberapa status. Adapun peringkat dan status kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi pada tahun 2011 berada di peringkat 14 dengan skor angka 2,4166. Kinerja Provinsi Jambi berdasarkan peringkat tersebut pada tahun 2017 menurun ke peringkat 33 sedangkan skor pada tahun 2017 meningkat pada skor 1,7026. Skor terendah kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi paling rendah terjadi pada tahun 2017 ini.

Tabel 1. Peringkat dan Status Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2017

No	Tahun	Peringkat	Skor	Status
1	2011	14	2,4166	TINGGI
2	2012	17	2,2188	TINGGI
3	2013	17	2,3222	TINGGI
4	2014	15	2,4875	TINGGI
5	2015	18	2,6367	TINGGI
6	2016	16	2,8404	TINGGI
7	2017	33	1,7026	SEDANG

Sumber www.otda.kemendagri.co.id (data tahun 2018)

Data diatas merupakan data kinerja terendah Provinsi Jambi selama 7 tahun terakhir. Kondisi ini tentu menjadi sebuah catatan buruk prestasi kinerja Provinsi Jambi yang harus diperbaiki. Penelitian ini melakukan penelitian tentang faktor – faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jambi. Adapun faktor – faktor tersebut antara lain Akuntabilitas, Transparansi, dan sistem Pengendalian Intern.

Faktor pertama yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah adalah Akuntabilitas menurut Penelitian Jitmau, Kalangi, dan Lambey (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, karena pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Kinerja pemerintah diposisikan baik apabila setiap perencanaan pemerintah untuk mancapai hasil yang maksimal dari perencanaan tersebut salah satunya pertanggungjawaban pengelolaan keulangan daerah dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi dalam penelitian ini sebaliknya pemerintah tidak melakukannya dengan benar. Perencanaan awal yang tidak sama dengan pencapaian hasil akhir biasanya ada saja yang gagal.

Amril (2014) menjelaskan hasil yang sama dengan penelitian Jitmau, Dkk (2016) dimana tidak terdapat pengaruh dari akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung belum memberikan pertanggungjawaban atas semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Artinya kinerja manajerial SKPD belum dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Saputra, Dkk (2014) meneliti hasil yang berbeda dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD Aceh Selatan. Kinerja SKPD diharapkan dapat meningkat dengan adanya akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap kegiatan aparatur pada semua tingkatan SKPD. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja SKPD.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah adalah Transparansi menurut Krisherdian (2015) mengatakan bahwa penyebab transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa hak publik untuk mendapatkan pengumuman oleh pemerintah terkait kebijakan publik sudah diikuti oleh efektifitas media yang digunakan pemberian informasi kepada publik yang dirasa telah meningkatkan kinerja pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan diketahui oleh publik karena kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Purnama Dan Nadirsyah (2016) menemukan hasil yang sama dengan penelitian Krisherdian (2015) bahwa penyebab transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah kepada para pemangku kepentingan. Penerapan asaz transparansi penting untuk diterapkan.

Hal ini disebabkan karena penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menjalankan pemerintah

yang bersih, jujur dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Karena transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukan semakin transparan pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan keuangan maka semakin meningkat kinerja pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah adalah sistem pengendalian intern. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Menurut penelitian Pujiono, Sukarno, dan Puspitasari (2016) Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Maluku Utara. Sistem pengendalian intern yang ada juga harus dilakukan secara baik, berhati-hati dan menekankan pada penghematan anggaran yang ada di Maluku Utara, dan kegiatan yang ada telah memberikan efesiensi pengelolaan keuangan yang akan memberikan kontribusi terhadap penghematan keuangan atau anggaran yang dilakukan untuk seuatu proses kerja atau program kerja tertentu yang ada di Maluku Utara, selain itu kehati-hatian yang ada juga memberikan efek yang baik dalam menjaga pribadi atau pegawai SKPD ang ada di Maluku Utara karena kehati-hatian yang ada akan mampu dipertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan dan ditimbulkan dari adanya kebijakan atass ebuah program kerja atau penganggaran yang telah *dilakukan di Maluku Utara.*

Dharmawan dan Supriatna (2016) menemukan hasil yang sama dengan penelitian Pujiono, Dkk (2016) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai suatu standar kinerja yang diinginkan.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Turalaki, Dkk(2017) yang meneliti pengaruh Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian Turalaki Dkk(2017)menemukan bahwa Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dirujuk.

Pertama, Penelitian Turalaki, Dkk(2017)menggunakan dua variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Kinerja Pelayanan Di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu Akuntabilitas, dan Transparansi.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut dalam menjelaskan terhadap Kinerja Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan 26,4%. Nilai ini masih dapat ditingkatkan lagi, sehingga penelitian ini menambahkan satu variabel independen, yaitu Sistem Pengendalian Intern yang mengacu pada penelitian Pujiono, Sukarno, dan Puspitasari(2016).

Kedua, penelitian Turalaki, Dkk (2017) menggunakan subjek Pelayanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan penelitian ini menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas di Provinsi Jambi. Ketiga, penelitian Turalaki, Dkk (2017) dilakukan pada tahun 2017, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.

Landasan Teori dan Hipotesis

Akuntabilitas

Mardiasmo (2004) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Transparansi

Transparansi menurut Mardiasmo (2013) adalah sebagai berikut:

> " Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat."

Selain itu Moh. Mahsun (2015) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut:

> "Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan."

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian intern merupakan Sistem pengendalian interen meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Kinerja Pemerintah Daerah

Istilah kinerja berasal dari kata *Performance* yang artinya *Manner Of Functioning*, artinya sejauh mana atau bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan atau tugasnya. Organisasi sektor publik memiliki tugas utama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam suatu pemerintahan atau demokrasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*), dalam hal ini pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masayarakat sebagai *principal*, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya Mahmudi (2016).

HipotesisPenelitian

$H_{1:}$ Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi

H_2 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi

H_3: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi

H_4 : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah OPD Provinsi Jambi.

METODE

Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah variabel yang terkait dalam penelitian yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem pengendalian Intern variabel Independen dan Kinerja Pemerintah Daerah variabel Dependen. Subjek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi.

PopulasidanSampelPenelitian

Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Dinas yang berjumlah sebanyak 19 dinas di Provinsi Jambi.Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Indriantoro dan Supomo (2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampel jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel Indriantoro dan Supomo(2018). Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala dinas OPD di Provinsi Jambi yang terdiri dari 19 dinas. Responden dalam penelitian ini adalah Pimpinan Dinas OPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, dan Bendahara OPD (Yuliani 2014).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, diperoleh dengan cara pemberian daftar pertanyaan kepada responden dan mengirim kuesioner pada Kepala Dinas di Provinsi Jambi

Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (Independen) dan variabel terikat (Dependen).

Variabel Independen *(Independent Variable)*

Variabel Independen *(Independent Variable)* disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnyaIndriantoro dan Supomo(2011).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem pengendalian Intern.

1. Akuntabilitas

   Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

   Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo, (2013)bahwa Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Kuesioner pengukuran variabel akuntabilitas diperoleh dari penelitian Yulia Perta, 2014 yang terdiri dari 13 item pernyataan. Skala pengukuran berbentuk *likert*, data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).
2. Transparansi

   Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi

masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Dwiyanto, (2015) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Kuesioner pengukuran variabel transparansi diperoleh dari penelitian Andrianto (2007) yang terdiri dari 9 item Pernyataan. Skala pengukuran berbentuk *likert*, data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).

3. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang baik diterapkan dalam suatu perusahaan akan menciptakan prosedur kerja yang sisematis dan sesuai dengan aturan-aturan yang lazim dipakai dalam organisasi, sehingga akan menciptakan lingkungan pengendalian yang saling mendukung pada setiap bagian dalam perusahaan.

Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian intern merupakan Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kuesioner pengukuran variabel transparansi diperoleh dari penelitian Rai, (2008) yang terdiri dari 11 item. Skala pengukuran berbentuk *likert*, data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).

Variabel Dependen *(Dependent Variable)*

Kinerja Pemerintah Daerah Istilah kinerja berasal dari kata *Performance* yang artinya *Manner Of Functioning*, artinya sejauh mana atau bagaimana suatu organisasi ataupun individu berfungsi sesuai dengan posisi dan atau tugasnya. Organisasi sektor publik memiliki tugas utama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam suatu pemerintahan atau demokrasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*), dalam hal ini pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masayarakat sebagai *principal*, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnyaMahmudi(2016).

Kuesioner pengukuran variabel kinerja pemerintah daerah diperoleh dari penelitian Yuli Perta, 2014 yang terdiri dari 7 item pernyataan. Skala pengukuran berbentuk *likert*, data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).

Teknik Skala pengukran

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan -responden memberikan respon atas pertanyaan tersebut.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu pengukuran dari pengaruh Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (OPD) Dinas di Provinsi Jambi dengan menggunakan kuisioner. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbentuk *likert*, data yang diperolah adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin(Sekaran, 2014).

Teknik Pengujian Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna mengetahui valid atau tidaknya instrumen penelitian. Apabila nilai *pearson correlation* terhadap skor total lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut valid (Sugiyono, 2012).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau kehandalan menunjukkan seberapa jauh suatu pengukuran menghasilkan kekonsistenan jika diukur dengan gejala dan alat ukur yang sama(Sugiyono, 2012). Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan *software SPSS* didapat nilai *cronbach's alpha* setiap variabel diperoleh hasil lebih besar dari 0,60. Hasil ini menunjukkan semua variabel dalam kuesioner dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Langkah berikutnya dalam pengujian hipotesis ini adalah dengan melakukan uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik yang akan dilakukan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah analisis antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal(Ghozali, 2016). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2012).

Untuk menguji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai diatas 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila data hasil perhitungan *one-sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.Multikolonieritas dapat dilihat pada *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2016).

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda yang akan dibantu dengan SPSS 22.0 maka dapat dilihat dalam rumus Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$Y= \alpha + \beta x1 + \beta x2 + \beta x3+ ei$…… (1)

Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam pengujian hipotesis ini digunakan bantuan paket program *SPSS 22 for Windows.* Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua tahap yakni:

1. Tahap 1 adalah menguji model penelitian dengan Uji F
   Model penelitian ini dapat dikatakan fit uji probabilitas signifikansi < 0,05.
2. Tahap 2 adalah menguji hipotesis dengan Uji t
   Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

Uji F

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, digunakan uji F. Uji F menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas (Ghozali, 2016). Kriteria pengujian berdasarkan output SPSS:

1. Jika Sig. < 0,05, berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
2. Jika Sig. > 0,05, berarti Ha ditolak dan Ho diterima.

Uji t

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, ketiga dan keempat maka akan digunakan uji satitistik t. Pengujian parameter individu (uji t) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2016). Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel pada tingkat keyakinan 95% (α = 0,05) dengan kriteria keputusan:

1. Jika Sig. < 0,05, berarti Ha diterima dan Ho ditolak.
2. Jika Sig. > 0,05, berarti Ha ditolak dan Ho diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi/R^2 digunakan unuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2016). Menurut Ghozali(2016)kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted* R^2 *Square* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Penelitian ini menguji Pengaruh Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) dan Sistem Pengendalian Intern (X_3) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah OPD 19 Dinas Provinsi Jambi. Penelitian ini menguji empat hipotesis.

Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerahtampak bahwa nilai signifikansi 0,000< 0,05 (α = 5%). Hal ini berarti bahwa model penelitian adalah *fit* atau dengan kata lain ada pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini **(H_1 diterima)**. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat diketahui dari uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji nilai koefisien determinasi sebesar 0,587. Hal ini berarti secara bersama-sama Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2) dan Sistem Pengendalian Intern (X_3), mampu menjelaskan variasi naik turunnya Kinerja Pemerintah Daerah (Y) sebesar 58,7 persen, sementara sisanya sebesar 41,3 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti Penyusunan Anggaran Amril, (2013), Komite Organisasi Saputra (2014), Ketepatan Waktu dan pengawasan internal Wandari, (2015).

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas adalah sebesar 0,482. Nilai signifikansi 0,000 < 0,0 (α = 5%). Dengan demikian Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah **(H_2 diterima)**. Semakin tinggi akuntabilitas maka semakin

tinggi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra, dkk (2014) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD Aceh Selatan. Kinerja SKPD diharapkan dapat meningkat dengan adanya akuntabilitas publik yang tinggi dari setiap kegiatan aparatur pada semua tingkatan SKPD. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah bisa memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja SKPD.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Penelitian (Jitmau, Dkk (2016) mengatakan bahwa akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, karena pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.Kinerja pemerintah dikatakan baik juga apabila setiap perencanaan pemerintah untuk mancapai hasil yang maksimal dari perencanaan tersebut salah satunya pertanggungjawaban pengelolaan keulangan daerah dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, tetapi dalam penelitian ini sebaliknya pemerintah tidak melakukannya dengan benar. Perencanaan awal tidak sama dengan pencapaian hasil akhir karena ada saja yang gagal.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan persamaan regresi di atas juga diperoleh nilai koefisien regresi variabel Transparansi sebesar 0,030. Nilai signifikansi 0,783 > 0,05 (α = 5%). Dengan demikian Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah **(H_3 ditolak)**. Tinggi rendahnya transparansi tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kelemahan transparansi keuangan pemerintah daerah yang perlu perhatian dan perbaikan agar dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian Lestiawan (2015) dan Erlanda, (2016). Hasil penelitian Lestiawan (2015) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi tidak menentukan pemda dalam memajukan kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang sudah melekat pada benak masyarakat tentang reputasi pemda tersebut, misalnya pemberitaan tentang banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang terjadi pemda di Indonesia. Dan hasil penelitian sejalan dengan pendapat Erlanda, (2016) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti korupsi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Krisherdian (2015) yang mengatakan bahwa penyebab transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah adalah dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa hak publik untuk mendapatkan pengumuman oleh pemerintah terkait kebijakan publik sudah diikuti oleh efektifitas media yang digunakan pemberian informasi kepada publik yang dirasa telah meningkatkan kinerja pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan diketahui oleh publik karena kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,495. Nilai angkasignifikansi 0,000 < 0,05 (α = 5%). Dengan demikian Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah **(H_4 diterima)**. Semakin Tinggi Sistem Pengendalian Intern, maka Semakin Tinggi Kinerja Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang Lestiawan (2015) dan Erlanda, (2016). Hasil penelitian Lestiawan (2015) menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi tidak menentukan pemda dalam memajukan kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang sudah melekat pada benak masyarakat tentang reputasi pemda tersebut, misalnya pemberitaan tentang banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang terjadi pemda di Indonesia. Dan hasil penelitian sejalan dengan pendapatErlanda, (2016) bahwa pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyimpangan alokasi sumber daya maupun berbagai pelanggaran dalam kegiatan pemerintahan seperti korupsi.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Krisherdian (2015) yang mengatakan bahwa penyebaptransparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa hak publik untuk mendapatkan pengumuman oleh pemerintah terkait kebijakan publik sudah diikuti oleh efektifitas media yang digunakan pemberian informasi kepada publik yang dirasa telah meningkatkan kinerja pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapatdikontrol dan diketahui oleh publik karena kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian

Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.
3. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.
4. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Provinsi Jambi.

Keterbatasan

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan peneliti. Karena responden banyak yang cenderung kurang teliti terhadap pernyataan yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. Hal ini bisa di antisipasi peneliti dengan cara mendampingi dan mengawasi responden dalam memilih jawaban agar responden fokus dalam menjawab pernyataan yang ada. Kurangnya sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.
2. Uji validitas penelitian ini menunjukkan masih ada dua pertanyaan yang tidak valid.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka dapat dibuat saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi aparatur di Organisasi Perangkat Daerah Dinas Provinsi Jambi, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pemerintah daerah sebagai tanggung jawab selaku pelayan publik yang mengelola anggaran agar dapat mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jambi melalui Akuntabilitas, Transparansi dan Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Intern yang baik dan pelaporan yang tertata dan terstruktur.
2. Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung, peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan juga metode pengumpulan data wawancara sehingga informasi yang didapat lebih akurat dan lengkap.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah aparatur yang bekerja pada Kantor Instansi Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Jambi, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Ikbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah ed.3*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Acosta, A. M. (n.d.). *The Impact and Effectiveness of Accountability and Transparency Initiatives : The Governance of Natural Resources The Impact and Effectiveness of Accountability and Transparency Initiatives : The Governance of Natural Resources*.

Adagbabiri, M. M. (2015). *Accountability and Transparency : An Ideal Configuration for Good Governance*. *5*(21), 1–5.

Albassam, A., Sci, J. P., Aff, P., & B, A. A. (2015). *Journal of Political Sciences &*. 1–9. https://doi.org/10.4172/2332-0761.S1-009

Ali, M. A. dan M. (2019). *Transparency , ethical disaster and public sector corruption control in Indonesia Transparency , ethical disaster and public sector corruption control in Indonesia*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012018

Amril, V. N. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, *4*(2), 1–32.

Andrianto, N. (2007). *Good e-Goverment Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Goverment*. Bayu Media.

Bandung, P. K., Dharmawan, T., & Supriatna, N. (2016). *Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah*. *4*(1), 941–948.

Baridwan, Z. (2008). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode: Vol. Yogyakarta*.

Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno, dan N. P. (2016). *Pengeruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara)*. *10*(1), 68–81.

Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press.

Erlanda, Khairudin R. (2016). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah kota se-sumatera)*. *7*(2).

Fifit Purnama Dan Nadirsyah. (2016). *Pengaruh Pengewasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten Aceh Barat Daya*. *1*(2).

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harvianda, Y. P. (2014). *JOM FEKON Vol.1 no. 2 Oktober 2014 1*. *1*(2), 1–15.

Jitmau, F., Kalangi, L., Lambey, L., Akuntansi, P. M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Sam, U. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)*. 276–285.

Krisherdian, R. A. G. (2015). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember (Influence Regional Financial Transparency And Accountability About Government Performance In Jember Regency)*.

Lestiawan, H. Y., Yogyakarta, U. M., Jatmiko, B., & Yogyakarta, U. M. (2015). Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Maksimum*, *5*(1), 32–49. https://doi.org/10.1007/s10529-005-2743-4

Mahmudi. (2016). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Edisi Revisi* (p. 210).

Mardiasmo. (2004). *Akuntasi Sektor Publik*.

Mardiasmo. (2013). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK l*. Andi Yogyakarta.

Moh. Mahsun. (2015). *Sektor Publik* (Edisi Keti).

Monika Bauhr, M. G. and N. H. (n.d.). *Seeing the State : The Implications of Transparency for Societal Accountability*. *June 2010*.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Salemba Empat.

Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. (2012). Mengungkap Kesiapan Umkm Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Psak-Etap) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. *Majalah Ekonomi*, *3*, 204–214.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH. (2008). *49*, 69–73.

Rai, I. G. A. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik* (p. 306). Salemba Empat.

Saputra, D. S., Darwanis, & Abdullah, S. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, *3*(2), 76–84.

Sekaran, U. (2014). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (2012th ed.).

Sunyoto, D. (2012). Metodologi Penelitian. *Ekonomi. Yogyakarta : CAPS.*

Supomo, N. I. D. B. (2018). Metodologi penelitian bisnis. In *UMSU Press*. https://books.google.co.id/books?isbn=6027033037

Supomo, N. I. dan B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi Pert).

Turalaki, S., Tinangon, J., Wokas, H., Akuntabilitas, P., Akuntabilitas, P., Transparansi, D. A. N., Terhadap, P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Akuntansi, J. (2017). *ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY EFFECT AGAINST PERFORMANCE PUBLIC SERVICE*. *5*(2), 1182–1192.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (2004). 249. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014).

Wandari, desak nyoman tri. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, *3*(1). https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4688